



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0188 /Bag. Adm Pemb/III/2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Nomor 523.800/21/Diskan/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
5. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukkan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Nomor 523.800/21/Diskan/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang delegasi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- KETIGA : Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang delegasi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- g. Menyusun dan melaporkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 188.45/0188 / Bag. Adm Pemb/III/2025

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SUB UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	NAMA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG	NAMA/PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6
1	BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hj. ROSMAWATI IDRUS, S.Pi.,MM NIP. 19720914 200212 2 006	ALI ASSAGAF, S.Pi., MH NIP. 19680810 199403 1 010
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2	BIDANG SARANA DAN PRASARANA (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasinya di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	RISNAWATI LAPADANGKU, S.Pi NIP. 19670603 199603 2 001	ALI ASSAGAF, S.Pi., MH NIP. 19680810 199403 1 010
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
3	BIDANG BUDIDAYA	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Ir. MEISKE M RAMBING, M.Si NIP. 19671001 200212 2 005	ALI ASSAGAF, S.Pi., MH NIP. 19680810 199403 1 010
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		

NO.	SUB UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	NAMA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG	NAMA/PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6
4	BIDANG DAYA SAING PRODUKSI PERIKANAN	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Micro & Kecil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Micro & Kecil Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	NURAFNI OKTAFIANTI, S.Pi., M.Si NIP. 19810121 201101 2 005	ALI ASSAGAF, S.Pi., MH NIP. 19680810 199403 1 010



 BUPATI DONGGALA,
 VERALENA LARUNI